



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**DINAS SOSIAL
KOTA JAMBI**

TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI

DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan petunjuk, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dijelaskan bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Negara mulai dari Pejabat Eselon II keatas wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun oleh masing-masing Instansi. Walaupun Perpres RI Nomor 29 tahun 2014 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan Sistem akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan Dinas Sosial Kota Jambi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2021 ini menyajikan berbagai Data sebagai tolak ukur keberhasilan atas Kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki untuk mencapai Visi dan Misi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang Sosial.

Keberhasilan di bidang Sosial yang dicapai, tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Sosial semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum, dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis yang konsisten dan realistis yang merupakan tujuan utama Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi.

Demikianlah Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 ini dibuat dan kami sangat menyadari bahwa dalam Penyusunan LKj ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan, guna perbaikan dan kesempurnaan pelaksanaan tugas kedepan. Semoga apa yang dihasilkan dari penyusunan LKjIP ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, terutama bagi Dinas Sosial Kota Jambi pada khususnya dan Pemerintah Kota Jambi pada umumnya.

Jambi, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL,



YUNITA INDRAWATI, AP, MP, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740607 199403 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	1
1.3 Isu-Isu Strategis	3
1.4 Kepegawaian	4
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	5
1.6 Keuangan.....	9
1.7 Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Perencanaan Strategis	11
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	11
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Sosial Kota Jambi	13
2.1.2.1 Tujuan Dinas Sosial Kota Jambi	13
2.1.2.2 Sasaran Dinas Sosial Kota Jambi	13
2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023.....	18
2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi.....	21
3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	21
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu	24
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Renstra Perubahan Tahun 2018-2023.....	25
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi	27

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternati Solusi Yang Telah Dilakukan	27
3.1.6 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber daya	28
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	29
3.2 Realisasi Anggaran 2023	33
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Rencana Tindaklanjut.....	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

1.1 Rincian Belanja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun Anggaran 2023	4
1.2 Daftar Jenis barang dan kondisinya per 31 desember 2023	5
2.1 Sasaran strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2018-2023	14
2.2 Sasaran, Program dan Kegiatan	14
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
2.4 Target Belanja Dinas Sosial Kota Jambi APBD Perubahan tahun 2023	19
3.1 Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja	21
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023	21
3.3 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2023.....	23
3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023.....	25
3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2018-2023.....	26
3.6 Analisis Efisiensi.....	28
3.7 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Jambi	35
3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2023	48
4.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	50
4.2 Inovasi	50

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

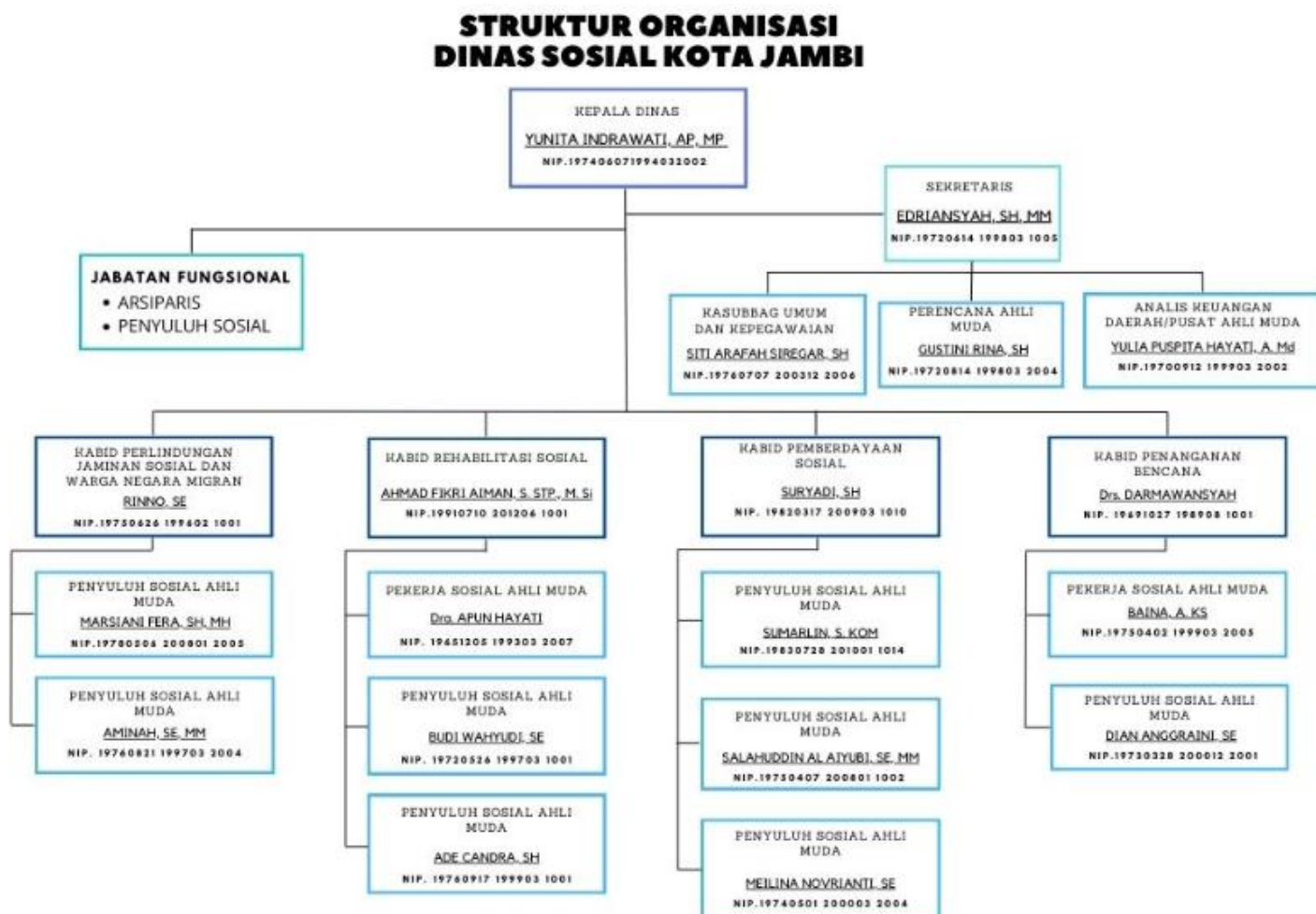
Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diakhir masa RPJMDP periode tahun 2018-2023 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Sosial Kota Jambi berdasarkan dengan rencana strategis perubahan tahun 2018-2023 dan rencana kerja tahun 2023 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 yang diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Sosial Kota Jambi.
2. Mendorong Dinas Sosial Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kota Jambi untuk meningkatnya kinerja
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Sosial Kota Jambi didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA JAMBI



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial merupakan salah satu OPD di Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, dengan tugas pokok yaitu:

Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dan Tugas Pembantuan yang meliputi :Tugas Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pelayanan dan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya yang terdiri dari sekretariat dan empat bidang

yang meliputi bidang penanganan bencana, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, Penetapan , dan Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan jaminan sosial dan warga Negara migran, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan bencana;
- b. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. Penetapan standar rehabilitasi sosial;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan dinas sosial;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas sosial;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas sosial;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas sosial di daerah;
- h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial;
- i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan sosial; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Permasalahan mendesak terkait urusan yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang melingkupi Dinas Sosial Kota Jambi, antara lain sebagai berikut :

1. Kemiskinan Ekstrem
2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Sumber Daya Manusia (SDM)

1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kota Jambi memiliki sumber daya manusia pada tahun 2023 terdapat 76 Pegawai yang terdiri dari 31 Orang PNS, dan 45 Tenaga Kontrak. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki sebanyak 55, 3 % (42 orang) dan sisanya sebanyak 44,7 % merupakan pegawai perempuan (34 Orang).

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Pada Dinas Sosial Kota Jambi

No	Nama Jabatan	Jumlah	Pendidikan
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	1 Orang	S2
2	Sekretaris	1 Orang	S2
3	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1 Orang	S2
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Penanganan Bencana dan Perlindungan Jamninan Sosial Warga Negara Migran	3 Orang	S1
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Orang	S1
6	Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Madya	2 Orang	S1
7	Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda	3 Orang	S2
8	Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda	5 Orang	S1
9	Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda	2 Orang	S1
10	Fungsional Perencana Ahli Muda	1 Orang	S1
11	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1 Orang	D3
12	Fungsional Arsiparis Ahli Madya	1 Orang	S1
13	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	1 Orang	S1
14	Fungsional Bidan Pelaksana Lanjutan	1 Orang	D3
15	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	1 Orang	S2
16	Penata Laporan Keuangan	1 Orang	S1
17	Analis Dampak Sosial	1 Orang	S1

18	Pengadministrasi Keuangan	1 Orang	SMA
19	Pengadministrasi Anak Terlantar	1 Orang	SMA
20	Pengadministrasi Umum	1 Orang	S1
21	Pengadministrasi Umum	1 Orang	SMA
22	Tenaga Kerja Kontrak	1 Orang	S2
23	Tenaga Kerja Kontrak	21 Orang	S1
24	Tenaga Kerja Kontrak	1 Orang	D3
25	Tenaga Kerja Kontrak	21 Orang	SMA
26	Tenaga Kerja Kontrak	1 Orang	SMP
Jumlah		76 Orang	

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada table berikut :

Tabel 1.2

Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2023

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan roda empat	8	B
2	Kendaraan roda empat	2	RR
3	Kendaraan roda empat	1	RB
4	Kendaraan roda dua	21	B
5	Kendaraan roda dua	1	RR
6	Kendaraan roda dua	3	RB
7	AC 1 PK	25	B
8	AC 1 PK	1	RR
9	AC 1 PK	3	RB
10	AC 2 PK	5	B
11	AC Split	2	B
12	AC Stand 2 PK	1	B
13	AC Stand 3 PK	1	B
14	AC 1 1/2 PK	3	B
15	Alat pemadam api ringan	20	B
16	Lemari arsip	27	B
17	Lemari rak buku	5	B

18	Lemari piring	2	B
19	Rak Lemari Gudang Bantuan Sosial	3	B
20	Rak biasa	1	B
21	Rak TV	1	B
22	Rak sound system	1	B
23	Lemari pakaian	7	B
24	Lemari es 2 pintu	1	B
25	Lemari es 1 pintu	1	B
26	Amplifier (TOA)	1	RB
27	Kursi stenlis ruang tunggu	6	B
28	Kursi stenlis ruang tunggu	2	RB
29	Bed susun + kasur	7	B
30	Tempat tidur tingkat	1	B
31	Bendera Hias/Umbul-umbul	1	B
32	Camera digital	3	RB
33	Camera digital (DSLR)	2	B
34	CCTV merk TANAKA	5	RB
35	CCTV	2 Paket	B
36	Komputer PC	3	RB
37	Komputer PC	25	B
38	Dispenser	13	B
39	Filling Cabinet (besi)	20	B
40	Genset	1	RB
41	Hordeng	16	B
42	Handy Talkie	3	RB
43	Harddisk eksternal	2	RB
44	Harddisk eksternal	3	B
45	Infocus	1	RB
46	Infocus	7	B
47	Karpet/ambal sholat	2	B
48	Karpet	9	B
49	Kipas angin	6	B
50	Kitchen set	1	B

51	Komputer jaringan	1	RB
52	Kursi Putar Sandaran Tinggi	3	RR
53	Kursi Putar Sandaran Tinggi	10	B
54	kursi sandaran putar sedang	14	B
55	Kursi Kerja Phoenix	3	B
56	Kursi Kerja	3	B
57	Kursi kerja pejabat eselon III	4	B
58	Kursi tamu	4	B
59	Kursi tamu	2	RR
60	Kursi roda	5	B
61	Lambang burung garuda	1	B
62	Layar projector	1	B
63	Laptop	16	B
64	Laptop	2	RB
65	Notebook	2	RR
66	Notebook	7	B
67	Notebook	1	RB
68	Meja kerja	38	B
70	Meja rapat	6	B
71	Meja pingpong	3	B
72	Meja Receptionist Kantor	1	B
73	Meja Kerja Front Office	1	B
74	Mesin Potocopy	1	RB
75	Mesin Penghancur Kertas	1	RR
76	Mesin Penyemprot Air	1	B
77	Mesin Absensi	2	B
78	Mesin Absensi	1	RB
79	Mesin pompa air	2	B
80	Mesin cuci	1	B
81	Mic	2	RB
82	Speaker	3	RR
83	Sound system	5	B
84	Speaker wireless portable	3	B
85	Mixer	1	RB

86	Papan Merek kantor ruang kessos	1	RB
87	Papan Informasi papan daftar urut kepangkatan (DUK)	1	B
88	Papan struktur organisasi	1	B
89	Papan visi misi	1	B
90	Papan data kegiatan bidang	1	B
91	papan merk ruangan	1	RB
92	Papan data bergambar disostek	1	RB
93	papan data rawan resiko bencana	1	B
94	Papan data ketenagakerjaan	1	RB
95	Papan informasi data PMKS	1	RB
96	Papan informasi running text	1	RB
97	Papan data Informasi PKH	1	B
98	Papan Pengumuman Pakai Roda	1	RB
99	Papan Merk Rumah Pintar	1	RB
100	Podium	1	RB
101	Pemasangan Teralis	1	RB
102	Peralatan kesehatan mobil ambulance	1	B
103	Printer	21	B
104	Printer	13	RB
105	Printer ink jet	6	RB
106	Printer laser	1	RB
107	Printer besar	1	RB
108	Televisi (tabung)	6	RB
109	Televisi (LED)	1	B
110	Toa jinjing	1	RB
111	Tikar Plastik	1	B
112	Tangga alumunium 4 tingkat	1	B
113	Tiang bendera	1	RB

114	Tiang bendera	1	B
115	Tape DVD	1	RB
116	Sofa	1	B
117	Tandu lipat	2	B
118	Sirine	1	B
119	Tedmon	2	B
120	Scanner	1	B
121	Timbangan tinggi badan dan berat	1	B
122	TV LED utk CCTV Aqua 32 inch	1	B
123	TV Led Samsung (BTT 2020)	9	B
124	Tablet android	23	B
125	Vakum cleaner	1	RB
126	Wireless	1	RB

1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2023, Dinas Sosial Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Dinas Sosial Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.389.109.187. Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan Program Kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja atau pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Startegis

Dinas Sosial Kota Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018-2023. Resntra Perubahan Dinas Sosial Kota Jambi merupakan komitmen Dinas Sosial Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPJMDP Kota Jambi Tahun 2018-2023. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. RPJMDP Pemerintah Kota Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmoni dan berkesinambungan. Renstra Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Sosial Kota Jambi.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023. Adapun Visi

yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi 2018-2023 adalah sebagai berikut :

“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA “

Visi misi tersebut mengandung makna :

Pusat Perdagangan dan Jasa	Berarti pemusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk pengganti moda
Berbasis Masyarakat	Community based merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dilingkungan serta bersedia untuk menerima perubahan
Berakhlak	Berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberi pelayanan maupun yang menerima pelayanan
Berbudaya	Memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan
Pelayanan Prima	Upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan muda

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam upaya pencapaian melalui 5 (lima) misi yakni :

1. Penguatan birokrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi

2. Penguatan penegakan huku, trantibmas dan kenyamanan masyarakat
3. Penguatan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan serta penataan lingkungan
4. Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan
5. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2018-2023 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam penyelenggaraan Urusan Sosial, Dinas Sosial Kota Jambi mendukung misi “ Peningkatan Kualitas kehidupan Masyarakat Perkotaan “

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Sosial Kota Jambi

2.1.2.1 Tujuan Dinas Sosial Kota Jambi

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Sosial Kota Jambi selama 5 tahun anggaran dari 2018-2023 adalah “ **TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING ”**

2.1.2.2 Sasaran Dinas Sosial Kota Jambi

Sasaran Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMMDP dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak

dicapai/dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2018-2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target Sasaran					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penurunan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Populasi PMKS dibagi dengan Jumlah Penanganan PMKS dikali 100 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %

2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Dinas Sosial Kota Jambi pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sasaran, Program dan Kegiatan

Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
Penurunan angka PMKS	Program Pemberdayaan Sosial	a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
		b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah

		Kabupaten/Kota
		1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
		3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
		1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
	Program Rehabilitasi Sosial	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia

		Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		1. Penyediaan Permakanan
		2. Penyediaan Sandang
		3. Penyediaan Alat Bantu
		4. Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
		1. Pemberian Layanan Kedaruratan
		2. Penyediaan Permakanan
		a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
		b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Jambi
	Program Penanganan Bencana	1. Penyediaan Makanan
		2. Penyediaan Sandang
		3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
		4. Penanganan Khusus Bagi

		Kelompok Rentan
		5. Pelayanan Dukungan Psikososial
		b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota Jambi
		1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
		2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanga atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta taget kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persen	100
Terpenuhinya Kebutuhan	Persentase PSKS terlantar di luar panti	Persen	100

Dasar PPKS Terlantar di luar panti	yang tertagani		
--	----------------	--	--

PENJELASAN KONSEPTUL HUBUNGAN ANTARA SASARAN DAN PROGRAM DINAS SOSIAL

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menangani PMKS	%	100
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan dilayani	%	100
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilayani	%	100
Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan bencana saat tanggap darurat	%	100

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Dinas Sosial Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan Anggaran Murni sebesar Rp. 10.610.500.000, dengan rincian belanja operasional sebesar Rp. 10.272.154.866 dan belanja modal sebesar Rp. 338.345.500 sedangkan anggaran perubahan menjadi Rp. 12.389.109.187 dengan rincian belanja operasional

sebesar Rp. 11.891.068.465 dan belanja modal sebesar Rp. 498.040.722

Tabel 2.4

Target Belanja Dinas Sosial Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasional	100 %	94%
Belanja Modal	100 %	95%
Jumlah	100 %	94,25%

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2023 Dinas Sosial Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Program	Anggaran	Persentase
1	Penurunan Angka PMKS	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.421.922.349	95,78 %
2		Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 1.771.106.770	98,92 %
3		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 53.063.080	59,76 %
4		Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.472.214.645	94,11 %

5		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 1.970.315.781	89,03 %
6		Program Penanganan Bencana	Rp. 700.486.562	86,99 %
JUMLAH			Rp. 12.389.109.187	94,25 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Sosial Kota Jambi kedepa.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Sosial Kota Jambi dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai perangkat peringkat kinerja yang termuat dalaam permendagri nomor 86 tahun 2017, yaitu :

Table 3.1
Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

No	Kategori	Rata-rata % capaian
1	Sangat Baik	≥90
2	Baik	75,00-89,9
3	Cukup	65,00-74,99
4	Kurang	50,00-64,99
5	Sangat Kurang	0-50,00

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/Rumus Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial dibagi dengan Jumlah Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial dikali 100 %	1.559 jiwa	1.559 jiwa	100
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Terlantar di Luar Panti	Persentase PMKS Terlantar di Luar Panti yang Tertangani	Jumlah PMKS Terlantar di Luar Panti dibagi Jumlah PMKS Terlantar di Luar Panti yang Tertangani dikali 100 %	706 Jiwa	706 Jiwa	100

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023, indikator Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial memiliki realisasi sebesar 1.559 jiwa dengan capaian 100 % dari target sebesar 1.559 jiwa dan Indikator Persentase PMKS Terlantar di Luar Panti yang Tertangani memiliki realisasi sebesar 706 jiwa dengan capaian 100 % dari target sebesar 706 jiwa Sesuai dengan kategori skala peringkat capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori (Sangat Baik).

Berdasarkan table 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam table 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2023

Program	Indikator Program	Formula Cara Pengukuran Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menangani PMKS	Jumlah PSKS yang menangani PMKS di bagi dengan Jumlah PMKS dibagi 100%	158	158	100
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Orang terlantar yang tertangani dibagi dengan Jumlah Orang terlantar yang ada dikali 100 %	216	216	100
Program	Persentase	Populasi	706	706	100

Rehabilitasi Sosial	PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan dilayani	PMKS dibagi dengan Jumlah Penanganan PMKS dikali 100 %			
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilayani	Jumlah Masyarakat yang terlayani di bagi jumlah masyarakat yang memerlukan layanan dikali 100 %	1.900	1.900	100
Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan bencana saat tanggap darurat	Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani dibagi korban bencana alam dan sosial di kali 100 %	1.559	1.559	100

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2022 dilakukan melalui analisis

pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKU).

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023

Indikator Sasaran	2022			2023			Persentase Realisasi 2023 terhadap Realisasi 2022
	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	
Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	217	217	100%	1.559	1.559	100%	100 %
Persentase PMKS Terlantar di Luar Panti yang Tertangani	3.192	2.624	121,65 %	706	706	100%	100 %

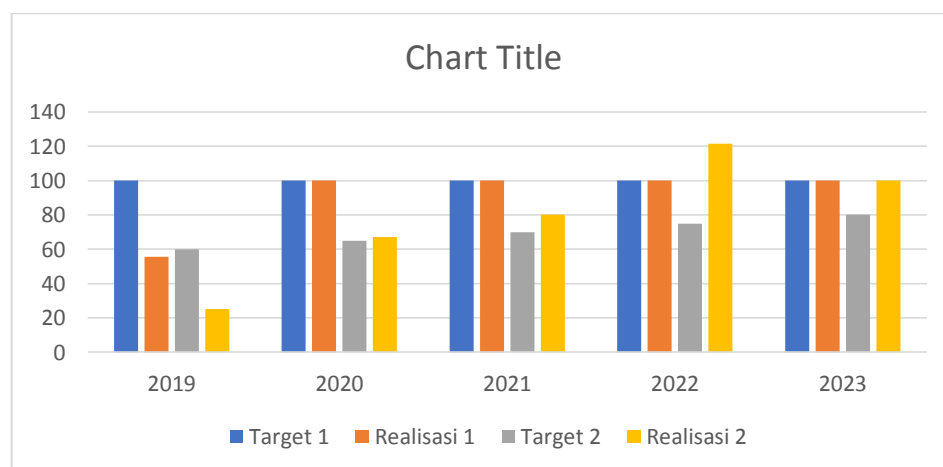
Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah 100 % . capaian kinerja tahun 2023 rendah dari tahun 2022.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun 2023 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2018-2023

Indikator Sasaran	2019		2020		2021		2022		2023	
	Tar get	Reali sasi	Tar get	Reali sasi	Tar get	Reali sasi	Tar get	Reali sasi	Tar get	Reali sasi
Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %	55.65 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase PMKS Terlantar di Luar Panti yang Tertangani	60 %	25,26 %	65 %	67,2 %	70 %	80 %	75 %	121,65 %	80 %	100 %

Dari table diatas juga dapat dicermati bahwa apabila realisasi tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan target pada akhrit renstra maka telah **tercapai**. Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan target.



Gambar 3.1 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran
Dibanding Target

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi

No	Indikator Sasaran	Target Nasional/Provinsi	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	-	100 %	100 %
2	Persentase PMKS Terlantar di Luar Panti yang Tertangani	-	100 %	100 %

Berdasarkan table diatas, perbandingan antara realisasi indikator sasaran tahun 2023 Dinas Sosial Kota Jambi dengan target standar nasional/provinsi, menunjukkan adanya kinerja organisasi terhadap target standar nasional dengan capaian sebesar 100 %.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja yaitu :

Faktor Penghambat Atau Permasalahan Yang Dihadapi :

1. Belum maksimalnya SDM pendukung dalam hal penanganan PMKS
2. Anggaran belum maksimal

Faktor Keberhasilan Atas Capaian Kinerja yaitu :

1. Sarana dan Prasarana yang memadai
2. Maksimalnya Kerjasama dengan stacholder terkait

Alternatif Solusi Yang Dilakukan :

1. Meningkatkan kerjasama dengan stacholder terkait

2. Mengoptimalkan kemampuan SDM pendukung dalam hal penanganan PMKS

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menyajikan informasi tentang tingkat efisiensi penggunaan sumber daya perangkat daerah. Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas indikator sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisien dari sasaran Dinas Sosial Kota Jambi pada tahun 2023.

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Realisasi Penyerapan Anggaran Atas Indikator Sasaran %	Tingkat Efisien
1	2	3	4	5	6= (5-4)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %	86,99 %	13,01%
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Terlantar di Luar Panti	Persentase PMKS Terlantar di Luar Panti yang Tertangani	100 %	94,11 %	5.89 %

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pejanjian Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian target kinerja tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah ini :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menangani PMKS
a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin PUB yang diterbitkan
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang diberdayakan
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Peningkatan Kemampuan	Jumlah Keluarga yang Meningkat

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kapasitas Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial dan Dilayani
a. Rehabilitasi Sosial Dasar	Jumlah Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang di layani
1. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang dilayani
1. Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani
a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota
b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin
1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana
a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Jambi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani
1. Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)

	dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota
b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota Jambi	
1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota

3.2 Realisasi Anggaran 2023

Penyerapan Anggaran Belanja pada tahun 2023 sebesar 94,25 % dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Sosial Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Jambi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi dan Birokrasi	6.421.922.349	6.151.162.973	95,78
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.035.250	57.049.870	98,30
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.260.700	43.310.130	97,85
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	13.774.550	13.739.740	99,75

		Realisasi Kinerja SKPD			
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.418.701.855	4.233.477.071	95,81
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.221.706.905	4.036.710.211	95,62
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		196.994.950	196.766.860	99,88
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	33.010.000	32.560.000	98,64
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.010.000	32.560.000	98,64
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian	158.100.000	154.511.907	97,73
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	103.100.000	103.056.000	99,96
	Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	10.800.000	10.800.000	100

	Sistem informasi Kepegawaian	dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44.200.000	40.655.907	91,98
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	326.507.298	324.843.938	99,49
	Penyediaan Kompoen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15.276.936	15.239.375	99,75
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	81.361.962	81.146.048	99,73
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	37.118.400	36.020.350	97,04
	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.750.000	192.438.165	99,84
	Pengadaan Barang Milik	Jumlah Dokumen Pengadaan	298.190.652	278.984.000	93,56

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	79.491.540	70.594.000	88,81
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	218.699.112	208.390.000	95,29
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang	520.843.600	489.214.257	93,93
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.230.000	6.230.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	187.000.000	161.942.348	86,60
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	327.613.600	321.041.909	97,99
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	608.533.694	580.521.930	95,40

	Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	436.030.000	408.944.930	93,79
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	125.618.694	125.200.000	99,67
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	46.885.000	46.377.000	98,92
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menangani PMKS	1.771.106.770	1.744.738.226	98,51
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin PUB yang diterbitkan	28.955.910	27.036.910	93,37

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	28.955.910	27.036.910	93,37
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	JumlahPSKS yang diberdayakan	1.742.150.860	1.717.701.316	98,60
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	503.336.040	496.341.540	98,61
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	134.628.830	134.056.730	99,58
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitas Kewenangan Kabupaten/Kota	733.631.300	722.188.206	98,44

	Kabupaten/Kota				
	6. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	297.958.200	292.810.650	98,27
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	72.596.490	72.304.190	99,60
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	53.063.080	31.708.980	59,76
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk	53.063.080	31.708.980	59,76

	untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	53.063.080	31.708.980	59,76
4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial dan Dilayani	1.472.214.645	1.385.478.215	94,11
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang di layani	729.707.844	693.044.105	94,98
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan	198.178.700	196.659.759	99,23

		Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	132.441.125	127.534.340	96,30
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	131.312.810	119.817.500	91,25
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	267.775.209	249.032.506	93
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	742.506.801	692.434.110	93,26

	HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	yang dilayani			
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	524.193.461	488.875.494	93,26
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	218.313.340	203.558.616	93,24
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani	1.970.315.781	1.754.218.811	89,03
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	27,034,405	26,265,510	97,16
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	27,034,405	26,265,510	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin	1.943.281.376	1.727.953.301	88,92

	Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	192.009.705	179.095.910	93,27
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.616.305.106	1.416.722.400	87,65
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	134.966.565	132.134.991	97,90
6	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	700.486.562	609.320.740	86,99
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Jambi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	351.822.080	279.753.940	79,52
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	181.457.500	123.753.000	68,20

		Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	119.082.420	110.297.840	92,62
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	26.628.910	23.197.650	87,11
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	12.354.000	11.220.000	90,82
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	12.299.250	11.285.450	91,76

	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota Jambi		348.664.482	329.566.800	94,52
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36.964.482	28.366.800	76,74
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	311.700.000	301.200.000	96,63
JUMLAH			12.389.109.187	11.676.627.945	94,25

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100 % menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Penurunan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	2.265	2.265	100	2.172.701. 207	1.994.798.955	92

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Pada umumnya semua Program Kegiatan telah dapat terlaksana sebagaimana mestinya, walaupun ada beberapa kegiatan yang belum maksimal terealisasikan.
2. Optimalisasi dan persentase dari target sasaran Pelayanan dan Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah sepenuhnya mencapai sasaran.
3. Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, berdisiplin, profesional, handal dan berdaya saing dalam rangka membantu dan mendukung pelaksanaan administrasi program kegiatan.

4.2 RENCANA TINDAKLANJUT

Rencana tindaklanjut untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kota Jambi:

1. Meningkatkan kerjasama dengan stacholder terkait
2. Mengoptimalkan kemampuan SDM pendukung dalam hal penanganan PMKS

Jambi, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL,



YUNITA INDRAWATI, AP, MP, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740607 199403 2 002

LAMPIRAN LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persen	100
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS Terlantar di luar panti	Persentase PSKS terlantar di luar panti yang tertagani	Persen	100

Tabel 4.2
Daftar Inovasi Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023

No	INOVASI	TAHUN	NAMA OPD	KATEGORI INOVASI	RINGKASAN INOVASI
1.	SIMANTAN (Sistem Informasi Masyarakat Rentan)	2022	Dinas Sosial	Pelayanan Publik	Sistem Informasi Masyarakat Miskin (SIMANTAN) merupakan inovasi berupa aplikasi berbasis website yang bertujuan untuk mempercepat penginputan data bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam DTKS yang disebut sebagai non-DTKS. Penggunaan aplikasi juga

					<p>mempermudah proses verifikasi dan validasi data dikarenakan dokumen yang diunggah langsung dalam aplikasi. Melalui laman simantan.jambikota.go.id, masyarakat dapat mengusulkan sebagai penerima bantuan sosial.</p>
--	--	--	--	--	---

Inovasi SIMANTAN ini mendapatkan penghargaan sebagai peringkat ke tujuh (7) sebagai Inovasi Pelayanan Publik.